



SKALA
Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar
Kemitraan Australia - Indonesia



Kementerian Keuangan
Republik Indonesia



Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia



BAPPENAS
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



Australian Government



PERKEMBANGAN KEMAJUAN SKALA: KONTRIBUSI DAN INFORMASI UTAMA

Desember 2024

Pendahuluan

SKALA merupakan program Kemitraan Australia-Indonesia untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam upaya mengurangi kemiskinan dan ketimpangan dengan meningkatkan penyediaan layanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan di daerah tertinggal. Kemitraan ini dibangun berdasarkan kolaborasi dan komitmen bersama untuk meningkatkan tata kelola desentralisasi pemerintahan. Salah satu kemajuan kolaborasi ini adalah peningkatan dukungan bersama dalam implementasi kegiatan. Pada periode Juli–Desember 2024, 56% kegiatan Program SKALA didanai bersama oleh Pemerintah Indonesia, meningkat 12% dibandingkan dengan semester sebelumnya. Peningkatan kolaborasi pendanaan ini menunjukkan kepercayaan Pemerintah Indonesia terhadap program ini sekaligus memastikan keberlanjutan jangka panjangnya. Program SKALA juga mengutamakan pendekatan lokal sebagai prioritas utama, dengan 98% stafnya merupakan warga Indonesia dan seluruh mitra strategis berasal dari organisasi di Indonesia. Hal ini memastikan bahwa program dijalankan oleh pemerintah dan selaras dengan kondisi serta kebutuhan di Indonesia. Dengan dukungan kuat dari kementerian/lembaga serta kolaborasi berkelanjutan dengan Pemerintah Australia, Program SKALA berkontribusi nyata dalam memperkuat tata kelola dan implementasi kebijakan yang lebih berkelanjutan.



56%

kegiatan Program SKALA didanai bersama oleh Pemerintah Indonesia



98%

staf program SKALA merupakan warga Indonesia, dan seluruh mitra strategis merupakan organisasi/lembaga di Indonesia, sehingga memastikan kepemilikan dan relevansi program.

Pada periode Juli–Desember 2024, Program SKALA terus berupaya memperkuat tata kelola dan penyediaan layanan dasar dengan mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, masyarakat sipil, serta kelompok rentan. Program SKALA beroperasi di 10 provinsi dengan tujuan menjembatani kebijakan nasional dan pelaksanaannya di daerah. Program ini juga melibatkan masyarakat sipil, sehingga perempuan dan kelompok rentan lainnya dapat berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan serta peningkatan layanan publik. Dengan memperkuat koordinasi, perencanaan, dan pengambilan keputusan berbasis data, Program SKALA mendukung pemerintah Indonesia pemerintah meningkatkan kapasitas dalam penyediaan layanan dasar. Program ini mendukung integrasi sistem data, memberikan bantuan teknis, serta pengembangan kebijakan untuk memperbaiki tata kelola, penganggaran, dan penyelenggaraan layanan publik. Pada 2024, SKALA memprioritaskan tata kelola data, perencanaan yang inklusif, standar pelayanan minimal layanan dasar, serta pengelolaan keuangan publik.

Pemilu 2024 membawa dinamika baru dalam tata kelola pemerintahan Indonesia, yang mencerminkan perpaduan antara keberlanjutan dan perubahan. Terpilihnya Presiden Prabowo Subianto sekaligus memastikan stabilitas kebijakan, tetapi ekspansi kabinet dan perubahan mandat kementerian membuka peluang bagi penyesuaian dan reformasi. Selain di tingkat pusat, Program SKALA perlu segera membangun kembali relasi dan kerja sama dengan pemerintahan baru di daerah yang mengalami transisi kepemimpinan. Program SKALA terus bekerja sama dan mendukung dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional guna memastikan implementasi program selaras dengan prioritas nasional dalam meningkatkan layanan publik.

Kemajuan Utama

Gambar 1. Pendekatan Sistem Program SKALA untuk Meningkatkan Tata Kelola Penyediaan Layanan Dasar



1. Konsolidasi data untuk layanan dasar yang inklusif

Program SKALA mendukung Pemerintah Indonesia dalam memperkuat tata kelola, integrasi, dan interoperabilitas data di berbagai tingkat pemerintahan guna memastikan perencanaan dan pengambilan keputusan berbasis bukti.



Program SKALA mendorong implementasi kebijakan Satu Data Indonesia dengan memfasilitasi dan meningkatkan koordinasi antara pemangku kepentingan di tingkat nasional dan daerah. Sebagai bagian dari upaya ini, Program SKALA berperan dalam memfasilitasi kerja sama antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bappenas, dan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 5/2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri. Peraturan ini memperjelas peran serta proses pengelolaan data bagi pemerintah daerah. Untuk mendukung implementasi peraturan tersebut, Program SKALA melakukan penilaian kesiapan di beberapa provinsi, termasuk Aceh dan Maluku,

guna mengidentifikasi kesenjangan kapasitas dan kendala penganggaran yang dapat memengaruhi pelaksanaan kebijakan ini. Temuan dari kajian penilaian ini digunakan oleh Kemendagri dalam menyusun rencana tata kelola data di tingkat daerah serta menjadi acuan bagi pemerintah provinsi dalam meningkatkan sistem data dan kepatuhan terhadap regulasi. *Di tingkat daerah*, Program SKALA memperkuat dukungannya dengan memberikan bantuan teknis kepada Forum Satu Data serta membantu provinsi dalam membangun kerangka regulasi, mekanisme penganggaran, dan perjanjian berbagi pakai data. Kolaborasi ini mendukung provinsi seperti Aceh, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Gorontalo dalam mengintegrasikan pengumpulan data secara lebih efektif guna mendukung perencanaan dan penyediaan layanan. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan lebih berbasis data yang akurat dan mudah diakses.

Program SKALA mendukung integrasi sistem data penganggaran, perencanaan, dan pembangunan di tingkat nasional dan daerah melalui bantuan teknis. Salah satu hasil yang dicapai adalah menghubungkan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) milik Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan SEPAKAT, alat analisis milik Bappenas, guna meningkatkan analisis belanja dalam perencanaan. Program SKALA juga memfasilitasi interoperabilitas antara SIKD Kemenkeu, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) milik Kemendagri, serta Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua (SIPPP), sehingga perencanaan keuangan lebih selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Program SKALA juga memberikan bantuan teknis dan pelatihan terkait SIPD di tingkat daerah agar pemerintah memiliki alat bantu yang lebih baik dalam perencanaan, penganggaran, dan penyediaan layanan dasar. Upaya ini telah memperkuat integrasi data di berbagai platform pemerintah, meningkatkan transparansi, alokasi sumber daya, serta pengambilan keputusan berbasis bukti. Dengan menyelaraskan data penganggaran dan perencanaan, Program SKALA diharapkan mendukung peningkatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah, mengidentifikasi pengeluaran secara lebih efektif, serta mendukung layanan publik yang lebih responsif.

2. Pemetaan penerima manfaat layanan dasar

Peningkatan ketepatan sasaran penerima manfaat memastikan bahwa sumber daya pemerintah dapat menjangkau individu dan rumah tangga yang paling rentan secara efektif. Program SKALA mendukung perencanaan dan penganggaran berbasis bukti, yang membantu mengurangi ketidakakuratan inklusi dan eksklusi dalam program serta layanan pemerintah.



Untuk itu, Program SKALA mendukung analisis dan pemanfaatan data dengan memperkuat integrasi data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dalam pengambilan keputusan kebijakan, perencanaan, dan penganggaran. Program ini bekerja sama dengan pemerintah di tingkat pusat dan daerah untuk mengintegrasikan data Regsosek ke dalam proses pengambilan keputusan guna memastikan alokasi sumber daya dan penyediaan layanan yang lebih tepat sasaran. Program SKALA membantu memperluas akses Regsosek kepada empat kementerian, tiga provinsi, dan 18 kabupaten, serta memberikan pelatihan langsung kepada 584 aparatur pemerintah lainnya, yang kemudian mereka melatih 3.086 pejabat tambahan. Di tingkat daerah, pemanfaatan data berperan penting dalam meningkatkan layanan dasar, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Gorontalo, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Kalimantan Utara. Pemerintah provinsi memanfaatkan data ini untuk upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), meningkatkan pemetaan geospasial bagi populasi yang rentan terhadap bencana, serta memperbaiki perencanaan program pendidikan dan perumahan. Salah satu contoh keberhasilan pemanfaatan data Regsosek adalah kegiatan pemadanan data di Provinsi NTT yang secara signifikan meningkatkan ketepatan sasaran dalam penanggulangan kemiskinan. Koreksi data klasifikasi terhadap lebih dari 1,7 juta individu memungkinkan alokasi anggaran yang lebih efisien, termasuk realokasi sebesar Rp5,75 miliar untuk pengurangan *stunting* dan Rp5,6 miliar untuk penanggulangan kemiskinan. Perbaikan ini memberikan manfaat langsung bagi kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan kepala keluarga.

Memperluas akses Regsosek kepada:

4 kementerian
3 provinsi
18 kabupaten
584 staf Pemerintah Indonesia dilatih langsung.
3.086 pejabat dilatih

Koreksi data klasifikasi >1.7 juta individu

Rp 5.75 miliar realokasi untuk pengurangan *stunting*

Rp 5.6 miliar realokasi untuk penanggulangan kemiskinan

Untuk meningkatkan akurasi program dan layanan pemerintah, Program SKALA juga berkontribusi dalam pengembangan Sistem Informasi Desa (SID) dengan memperbaiki proses pengumpulan data di daerah.



Program ini mendukung perluasan SID di berbagai provinsi melalui kerja sama dengan Bappenas, Kemendagri, dan Kemendes guna mengintegrasikan metodologi standar dalam pengumpulan data rumah tangga.



REGSOSEK
REGISTRASI SOSIAL EKONOMI

Salah satu peningkatan utamanya adalah integrasi variabel data sosial ekonomi dari Regsosek ke dalam SID, sehingga sistem data desa lebih selaras dengan kebijakan nasional.



SIO PAPUA



SAIK+

Di Provinsi Papua dan Papua Barat, Program SKALA mendukung menggabungkan variabel Regsosek ke dalam SIO Papua dan SAIK+, sehingga pemerintah daerah dapat menggunakan indikator sosial ekonomi yang terstandarisasi untuk meningkatkan penilaian rumah tangga serta ketepatan sasaran program. Pendekatan ini membantu pemerintah daerah mengidentifikasi rumah tangga rentan secara lebih efektif, sehingga mengurangi ketidakakuratan inklusi dan eksklusi dalam penyelenggaraan program.

SID

Sistem Informasi Desa

Dengan cakupan SID yang semakin luas, Program SKALA terus menyempurnakan protokol pengumpulan data serta memperkuat keterhubungan antara sistem data tingkat desa dengan kerangka tata kelola data daerah yang lebih luas, sejalan dengan kerangka kerja Satu Data Indonesia.

Selain itu, Program SKALA berupaya meningkatkan akses masyarakat sipil terhadap data yang relevan dengan mendukung pemerintah provinsi dalam memastikan ketersediaan data terpilah tentang kelompok rentan melalui portal data publik. Di Provinsi NTB, Aceh, dan Kalimantan Utara, Program SKALA memberikan dukungan teknis agar portal data daring dapat diakses oleh pengguna penyandang disabilitas netra, serta mengeksplorasi kemitraan untuk meningkatkan kapasitas organisasi masyarakat sipil (OMS) dalam memanfaatkan data secara efektif untuk advokasi. Untuk lebih mengintegrasikan OMS dalam proses perumusan kebijakan, Program SKALA memfasilitasi partisipasi OMS dalam 30 proses perencanaan daerah guna membantu menyusun kebijakan terkait kesetaraan gender, hak-hak penyandang disabilitas, dan pengentasan kemiskinan. Sebuah survei yang dilakukan terhadap OMS menunjukkan bahwa Program SKALA memperkuat jaringan mereka dengan pemerintah daerah, dengan tingkat keterlibatan mencapai 75% di Provinsi Aceh dan 80% di Gorontalo. Dengan memperluas akses dan pemanfaatan data, Program SKALA bertujuan untuk mendorong advokasi berbasis bukti dan pengambilan keputusan yang lebih inklusif.

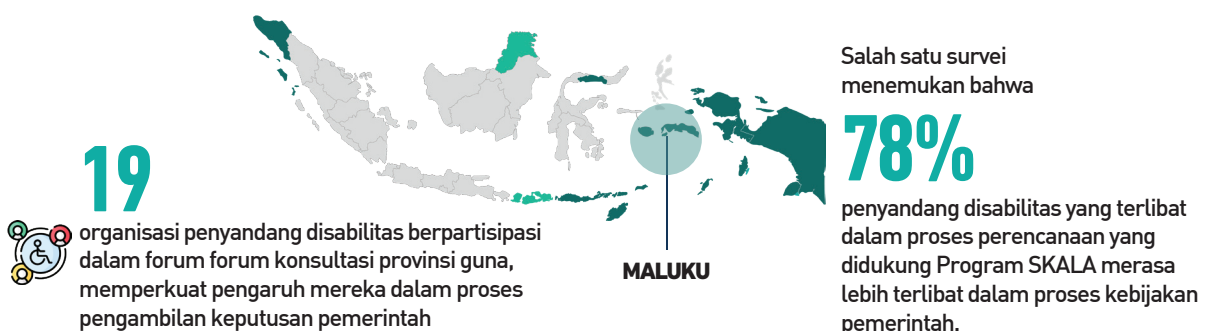
SKALA memfasilitasi partisipasi OMS dalam 30 proses perencanaan daerah guna membantu merancang kebijakan terkait kesetaraan gender, hak-hak disabilitas, dan pengentasan kemiskinan.

Survei terhadap OMS menunjukkan bahwa Program SKALA memperkuat jaringan mereka dengan pemerintah daerah, dengan tingkat keterlibatan mencapai

75% di Provinsi Aceh
80% di Provinsi Gorontalo

3. Perencanaan layanan dasar

Program SKALA berperan dalam penyusunan panduan nasional dan mendukung reformasi daerah agar perencanaan lebih mencerminkan kebutuhan masyarakat setempat serta mendorong kesetaraan. Program SKALA mendukung pengembangan Panduan Perencanaan Partisipatif Inklusif Nasional untuk memperkuat tata kelola di tingkat daerah dengan memanfaatkan pengalaman dari proses perencanaan kerja partisipatif pertama di Provinsi Kalimantan Utara. Pedoman ini menetapkan mekanisme untuk menilai kualitas partisipasi, memperjelas peran, dan memastikan perencanaan yang responsif gender. Meskipun masih dalam tahap pembahasan, pedoman ini diharapkan dapat meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap kelompok rentan. Untuk lebih melembagakan perencanaan inklusif, Program SKALA mendukung Kemendagri dan Bappenas dalam mengintegrasikan prinsip inklusivitas serta pengambilan keputusan berbasis data ke dalam panduan perencanaan yang formal. Di tingkat daerah, Program SKALA memfasilitasi masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil, guna memastikan kebijakan yang dihasilkan lebih mencerminkan kebutuhan masyarakat setempat. Sebagai bagian dari upaya ini, Program SKALA membantu merevitalisasi forum konsultasi provinsi guna memperluas partisipasi yang bermakna dalam proses kebijakan pemerintah. Di Provinsi Maluku, sebanyak 19 organisasi penyandang disabilitas berpartisipasi dalam forum ini, memperkuat pengaruh mereka dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Salah satu survei menemukan bahwa 78% penyandang disabilitas yang terlibat dalam proses perencanaan yang didukung Program SKALA merasa lebih terlibat dalam proses kebijakan pemerintah. Upaya ini menghasilkan komitmen konkret di berbagai provinsi, termasuk inisiatif berbagi pengetahuan di Provinsi NTB dan prioritas Kalimantan Utara terhadap infrastruktur yang ramah disabilitas serta program dukungan pengasuhan anak. Selain itu, Program SKALA berkontribusi dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dari pajak dan retribusi dengan terus di provinsi mendorong daerah untuk tetap memperhatikan kelompok rentan. Langkah ini memastikan bahwa layanan publik lebih responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan di Provinsi NTB, Aceh, dan Kalimantan Utara.



Program SKALA turut memfasilitasi dialog kebijakan di Provinsi NTB untuk memperkuat ketahanan iklim dengan mengintegrasikan data konvensional dan satelit ke dalam proses perencanaan. Melalui kerja sama dengan Kemendagri dan UN Global Pulse, inisiatif ini memberikan alat bantu bagi para pemimpin daerah untuk menilai risiko iklim dan merancang strategi adaptasi yang lebih terarah. Keberhasilan pendekatan ini membuka peluang replikasi di daerah lain, sehingga Program SKALA berencana menerapkannya di Provinsi Maluku, Kalimantan Utara, dan Gorontalo guna memperluas dampaknya. Sebagai bagian dari upaya ini, Program SKALA juga berkolaborasi dengan Bappenas dalam mengkaji model klaster subnasional yang memasukkan kerentanan iklim ke dalam skema transfer fiskal dan perencanaan regional. Pendekatan ini bertujuan untuk mendukung desentralisasi asimetris dengan mengidentifikasi daerah-daerah yang menghadapi tantangan pembangunan serupa.

4. Penganggaran untuk layanan dasar

Pengelolaan anggaran yang efektif dapat memastikan sumber daya yang terbatas dimanfaatkan secara optimal, sehingga belanja pemerintah selaras dengan prioritas nasional dan kebutuhan kelompok rentan. Dengan memperkuat perencanaan dan pengawasan fiskal, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas layanan, meningkatkan transparansi, serta mendorong pembangunan yang lebih adil dan inklusif.

Sebagai bagian dari upaya ini, Program SKALA mendukung penguatan penganggaran responsif gender, perbaikan pemetaan anggaran, serta pengembangan alat bantu yang mendukung daerah menyelaraskan belanja mereka dengan prioritas nasional. Dalam setahun terakhir, Program SKALA berperan

dalam pengembangan model penandaan anggaran gender pertama di Indonesia, mendukung revisi sistem klasifikasi anggaran oleh Kemendagri, serta membantu Kementerian Keuangan menyempurnakan model ini agar menjadi dasar regulasi nasional yang baru. Kolaborasi antara Kemenkeu, Kemendagri, Bappenas, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memungkinkan pemerintah daerah menilai sejauh mana anggaran mereka telah responsif terhadap isu gender dan bagaimana menyelaraskannya dengan target nasional. *Untuk memastikan keselarasan kebijakan antara tingkat nasional dan daerah,* Program SKALA turut mendukung Kemenkeu dalam menyebarluaskan persyaratan fiskal utama serta mengembangkan alat bantu yang memungkinkan provinsi dan kabupaten/kota meninjau belanja mereka. Program SKALA juga bekerja sama dengan Kemendagri dalam membangun mekanisme penilaian anggaran, agar Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan prioritas GEDSI tetap menjadi bagian dari kebijakan fiskal daerah. Dampaknya sudah mulai terlihat. Di Provinsi NTB, misalnya, anggaran 2025 kini lebih selaras dengan prioritas nasional, termasuk program makanan untuk siswa dan pencegahan stunting. Di Provinsi Gorontalo, Program SKALA memfasilitasi diskusi antara penyandang disabilitas dan anggota parlemen dengan menggunakan data Regsosek untuk memastikan pendanaan yang lebih tepat sasaran. Dengan mendukung kajian kebijakan dan alat perencanaan fiskal, Program SKALA membantu memastikan bahwa penganggaran responsif gender menjadi bagian dari kebijakan anggaran untuk tahun 2026 dan seterusnya.

Program SKALA mendukung pemerintah pusat dalam optimalisasi transfer fiskal ke pemerintah daerah agar dana sebesar Rp714,37 triliun dapat dikelola dengan lebih efektif untuk mendukung layanan dasar. Bersama kementerian dan pemerintah daerah, Program SKALA memperkuat perencanaan, penganggaran, serta tata kelola dalam enam mekanisme transfer utama. Beberapa kontribusi utamanya mencakup penyempurnaan formula alokasi berbasis kinerja untuk Dana Alokasi Umum (DAU), peningkatan penargetan hibah daerah untuk infrastruktur dan layanan sosial, serta upaya persiapan pembentukan Dana Abadi Daerah di provinsi dengan kapasitas fiskal tinggi. Selain itu, Program SKALA juga membantu memperbaiki tata kelola transfer dana bagi hasil, dana desa, dan dana otonomi khusus (OTSUS). Di Provinsi Aceh dan Papua, Program SKALA mendukung penyusunan pedoman tata kelola, memberikan pelatihan bagi pejabat daerah dalam pengelolaan dana OTSUS, serta memfasilitasi pemantauan guna meningkatkan transparansi. Upaya ini telah membantu merampingkan perencanaan anggaran provinsi, menghilangkan pengeluaran yang tumpang tindih, serta memperkuat mekanisme akuntabilitas. Dengan memperbaiki alokasi dana dan tata kelola keuangan, Program SKALA berkontribusi pada manajemen fiskal yang lebih efisien dan memperluas akses terhadap layanan publik yang inklusif di provinsi mitra.



Program SKALA juga mendukung implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) dengan memperkuat sistem pendapatan daerah guna meningkatkan kualitas penyediaan layanan dasar. *Di tingkat nasional*, Program SKALA memfasilitasi kerja sama antara Kemenkeu dan Kemendagri agar pemerintah provinsi mendapatkan panduan yang lebih jelas mengenai kebijakan pajak dan retribusi. Untuk meningkatkan proyeksi pendapatan, Program SKALA membantu Kemenkeu dalam mengembangkan metode perhitungan pajak provinsi yang lebih akurat, memperbaiki penganggaran, berbagi pakai data, serta meningkatkan kepatuhan fiskal. Hal ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas fiskal provinsi agar mampu membiayai layanan dasar secara mandiri. *Di tingkat daerah*, Program SKALA membantu provinsi menyelaraskan regulasi pajak mereka dengan pedoman nasional melalui pemetaan aset pajak daerah serta memberikan jaminan kualitas terhadap regulasi yang diajukan. Dengan pendekatan ini, persetujuan regulasi menjadi lebih cepat, sementara pengawasan perpajakan makin diperketat. Salah satu kontribusi penting Program SKALA adalah advokasi untuk pembebasan pajak bagi kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas, yang telah menghasilkan kebijakan pengurangan pajak kendaraan dan retribusi di beberapa provinsi. Di Provinsi NTB, pemerintah provinsi telah menerapkan kebijakan ini. Program SKALA juga memfasilitasi diskusi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, yang menghasilkan nota kesepahaman mengenai alokasi dan tanggung jawab pajak. Pembelajaran dari berbagai reformasi ini sedang didokumentasikan agar dapat menjadi panduan bagi provinsi lain, sehingga pengelolaan pendapatan daerah dapat terus diperbaiki dan semakin berkelanjutan.

5 & 6. Penyediaan Layanan Dasar yang Efektif dan Hasil yang Bermanfaat

Tata kelola yang kuat dan kebijakan fiskal yang baik merupakan kunci dalam penyediaan layanan publik berkualitas yang dapat menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan. Dengan meningkatkan koordinasi, integrasi data, dan perencanaan, Program SKALA berupaya membantu pemerintah pusat dan daerah agar kebijakan yang dirancang dapat diterapkan secara nyata dan menghasilkan dampak berarti bagi masyarakat. Program SKALA telah berkontribusi pada pencapaian berikut:



Penguatan Data dan Optimalisasi Pemanfaatannya untuk Layanan Dasar

- Lima pedoman Kemendagri tentang Satu Data Pemerintah Dalam Negeri (SDPDN) telah disusun, mencakup tata kelola data, portal, pemantauan & evaluasi (M&E), serta rencana aksi untuk meningkatkan pemanfaatan data dalam perencanaan daerah.
- Peraturan Kemenkeu 108/2024 kini mengintegrasikan data realisasi Dana Desa untuk memperbaiki alokasi anggaran tahun 2025.
- SIPD kini dapat mengidentifikasi kegiatan pengarusutamaan gender, SIKD dapat menganalisis belanja berbasis gender, dan SIKD-Aceh sedang dikembangkan untuk pengelolaan Dana Otonomi Khusus.
- Penguatan sistem data dengan mengintegrasikan SIPD Hub, SEPAKAT, SIKD, dan SIPPP guna meningkatkan pengambilan keputusan berbasis data di tingkat daerah.
- SIGAP di Provinsi Aceh berhasil meningkatkan cakupan data sebesar **9%**, sehingga kini mencakup **47%** populasi untuk mendukung penargetan layanan yang lebih tepat sasaran.



Perencanaan, Implementasi, dan Pemantauan Kebijakan yang Lebih Partisipatif

- Tiga pedoman perencanaan Kemendagri kini telah mengintegrasikan data Regsosek untuk analisis gender dan disabilitas dalam RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
- Sebanyak **51** organisasi masyarakat sipil (OMS) telah terlibat aktif dalam perencanaan daerah, dengan **24** usulan dari masyarakat diterima dalam Rencana Kerja (Renja) Pemda tahun 2025.
- Beberapa daerah seperti Provinsi NTB, NTT, Kaltara, Gorontalo, dan Maluku tengah mengembangkan kebijakan untuk meningkatkan partisipasi inklusif dalam proses perencanaan.
- Sebanyak **81** klasifikasi anggaran telah direvisi dan lima klasifikasi baru diusulkan untuk mendukung inklusi gender dan disabilitas, yang saat ini masih dalam pembahasan dengan Kemenkeu dan Bappenas.
- Provinsi Aceh dan NTT telah meratifikasi Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk Penyandang Disabilitas.



Pengelolaan dan Pemanfaatan Anggaran yang Lebih Efektif di Tingkat Daerah untuk Penyediaan Layanan Dasar

- Program SKALA mendukung pemerintah daerah di Provinsi Aceh, NTT, NTB, dan Kaltara dalam menerbitkan peraturan pajak dan retribusi daerah, peraturan gubernur, serta SOP guna meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah.
- Di Provinsi NTB dan Gorontalo, Program SKALA membantu penyusunan rencana aksi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di tingkat kabupaten, sekaligus memperkuat pelaporan fiskal dan pemantauan anggaran.
- Program SKALA turut berkontribusi dalam pengembangan indeks untuk mengukur kinerja fiskal dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan akses layanan.
- Di Provinsi Kaltara, alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) untuk sektor pendidikan meningkat hingga **52%**.



Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

- Peraturan Kemendagri 15/2024 kini menjadi acuan dalam penyusunan APBD 2025, sementara modul *e-review* terbaru membantu meningkatkan evaluasi anggaran daerah.
- Panduan dan instrumen pembiayaan SPM nasional tengah disusun untuk memastikan provinsi dapat mengalokasikan dana yang memadai bagi layanan dasar.
- Sebanyak **23** kabupaten/kota di Provinsi Aceh dan **3** kabupaten/kota di Tanah Papua berhasil mengajukan rencana OTSUS 2025 sesuai tenggat waktu nasional.
- **7** provinsi mitra telah meningkatkan ketersediaan data pelayanan publik.
- **7** provinsi kini memberikan dukungan terstruktur kepada kabupaten dalam perencanaan, penganggaran, dan koordinasi penyediaan layanan publik.

Pembelajaran

- 1** Program SKALA tidak hanya berkontribusi bagi kementerian mitranya, tetapi juga dalam memperkuat koordinasi dan pembangunan kapasitas di berbagai lembaga pemerintah guna meningkatkan penyampaian layanan. Program SKALA bekerja sama dengan Kemendagri dan kementerian sektoral untuk meningkatkan pelaporan SPM melalui pelatihan bersama serta menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah dengan memfasilitasi kolaborasi antara Bappenas dan Kemendagri dalam tata kelola data daerah. Program SKALA juga mendukung upaya pemantauan bersama, termasuk koordinasi antara Kemendagri dan Kemenkeu dalam misi OTSUS dan SPM di Provinsi Papua serta bantuan bagi Bappenas dan Kemendagri dalam mengevaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) di Provinsi Aceh, Gorontalo, Maluku, dan NTT. Program SKALA mendukung strategi implementasi daerah yang terkoordinasi secara nasional untuk mempercepat dampak, terutama melalui pendekatan terpadu Kemendagri dan Bappenas dalam implementasi Rencana Satu Data Daerah. Dengan memperjelas peran dan tanggung jawab kementerian dalam satu pedoman yang terintegrasi, Program SKALA membantu menyederhanakan penerapan kebijakan dan mengurangi beban administrasi bagi provinsi. Selain itu, Program SKALA juga memperkenalkan model pelatihan berbasis kerja untuk memperkuat perencanaan dan penganggaran, seperti kelompok kerja desentralisasi di Provinsi Papua untuk meningkatkan perencanaan OTSUS serta model pembangunan kapasitas bersama antara Kemendagri dan Kantor Sektor Provinsi untuk membimbing tenaga SPM. Melalui pemanfaatan sumber daya program, solusi pelatihan yang hemat biaya ini membantu mitra pemerintah beradaptasi dengan pembatasan perjalanan nasional seraya tetap mempertahankan pengembangan kapasitas daerah yang kuat.

- 2 Implementasi Program SKALA memberikan pembelajaran yang bermakna bagi kerangka desentralisasi di Indonesia, khususnya dalam memperkuat perencanaan, penganggaran, dan penyediaan layanan di tingkat daerah melalui pengawasan yang lebih terkoordinasi dan kolaborasi antar kementerian.** Koordinasi antara Kemendagri, Bappenas, dan Kemenkeu menunjukkan bagaimana tata kelola data sosial ekonomi yang selaras dapat mendukung pengambilan keputusan kebijakan yang lebih efektif di tingkat nasional dan provinsi. Pengalaman program ini dalam mengelola OTSUS di Provinsi Papua juga memberikan pembelajaran yang dapat diterapkan pada model tata kelola desentralisasi lainnya, termasuk di Provinsi Aceh. Selain itu, misi pemantauan dan evaluasi bersama menunjukkan bahwa kolaborasi yang terstruktur dapat meningkatkan hasil tata kelola. Sementara itu, model pengembangan kapasitas Program SKALA bagi tim SPM dan pengelolaan kesejahteraan sosial memberikan solusi yang dapat diperluas untuk meningkatkan penyampaian layanan di daerah. Program SKALA mendukung reformasi yang sedang berjalan dengan mengintegrasikan pembelajaran ini ke dalam diskusi kebijakan nasional guna memperkuat desentralisasi dan akuntabilitas pemerintahan.
- 3 Capaian ini perlu terus didukung melalui kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.** Penguatan mekanisme koordinasi dan penyelarasan kebijakan di semua tingkatan pemerintahan akan menjadi kunci untuk mempertahankan keterpaduan kebijakan serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam jangka panjang. Dengan membangun kemitraan yang berkelanjutan dan memperkuat proses pengambilan keputusan bersama, pendekatan Program SKALA dapat membantu mengintegrasikan reformasi ini ke dalam sistem tata kelola yang lebih luas, sehingga dampaknya terhadap desentralisasi di Indonesia dapat terus berlanjut.

Langkah Selanjutnya dan Prioritas Strategis



Dengan terus memperkuat keselarasan kebijakan, desentralisasi fiskal, dan mekanisme tata kelola, kemajuan Program SKALA tidak hanya berdampak pada kementerian mitra, tetapi juga pada berbagai tingkat pemerintahan dan masyarakat sipil.

Menyelaraskan kegiatan Program SKALA dengan kebijakan nasional dan kerangka fiskal yang berkembang.

Program SKALA berperan dalam mendukung kebijakan Satu Data Indonesia dengan mengoordinasikan pemangku kepentingan di tingkat nasional dan daerah untuk meningkatkan tata kelola data. Untuk memperkuat kontribusinya, Program SKALA dapat lebih mendukung Forum Satu Data dengan memperjelas peran tiap pihak, memastikan keberlanjutan pendanaan, serta memberikan panduan teknis dalam pengelolaan data. Koordinasi yang erat dengan Kemendagri, Bappenas, dan BPS tetap menjadi kunci dalam mewujudkan kebijakan ini menjadi perbaikan nyata di tingkat provinsi. Penguatan forum-forum ini akan membantu pemerintah daerah dalam mengelola dan memanfaatkan data secara lebih efektif dalam proses pengambilan keputusan.

Program SKALA juga dapat memperkuat tata kelola berbasis data dengan meningkatkan akses pemerintah daerah terhadap data sosial-ekonomi. Koordinasi berkelanjutan dengan Kemendagri, Bappenas, dan BPS sangat penting untuk memastikan implementasi kebijakan tata kelola data daerah berjalan optimal. Salah satu prioritas utamanya adalah mengintegrasikan sistem keuangan dan perencanaan, seperti menghubungkan data keuangan Kemenkeu dengan SEPAKAT, guna meningkatkan analisis belanja dan alokasi sumber daya. Perluasan penggunaan data sosial-ekonomi nasional melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas akan membantu pemerintah daerah mengatasi kesenjangan data serta meningkatkan aksesibilitas. Peningkatan ini memastikan bahwa kebijakan inklusif, baik di tingkat pusat maupun daerah, dapat didukung oleh data berkualitas yang akurat.

Mengarusutamakan GEDSI dalam perencanaan di tingkat pusat dan daerah.

Untuk memperkuat tata kelola yang inklusif, Program SKALA akan terus mengintegrasikan GEDSI dalam seluruh kegiatannya, sejalan dengan prioritas pemerintah yang terus berkembang. Program SKALA akan mendukung implementasi NIPPG dan, seiring dengan dilantiknya pemerintahan provinsi yang baru, Program SKALA terus mendorong partisipasi lebih besar dari masyarakat sipil. Program SKALA akan membekali organisasi masyarakat sipil (OMS) dengan alat bantu berbasis data untuk advokasi serta meningkatkan aksesibilitas portal data provinsi agar penyandang disabilitas dapat mengakses informasi publik dengan lebih mudah. Melalui penguatan kemitraan dan promosi advokasi berbasis data, Program SKALA berupaya menciptakan lingkungan kebijakan yang lebih inklusif di tingkat pusat maupun daerah.

Melanjutkan optimalisasi fiskal di tingkat provinsi untuk meningkatkan penyediaan layanan dasar.

Program SKALA akan terus mengoptimalkan transfer fiskal untuk penyediaan layanan dasar guna membantu pemerintah daerah mengelola dana transfer pusat lebih efektif sesuai dengan UU HKPD. Untuk memperkuat pengelolaan fiskal publik, Program SKALA akan mendukung pemerintah daerah dalam menerapkan temuan Analisis Pendapatan dan Belanja Publik, termasuk pengembangan regulasi pajak, prosedur pemungutan retribusi, serta strategi pendapatan baru. Program SKALA juga memastikan bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) diintegrasikan dalam anggaran daerah, sehingga perencanaan fiskal tetap selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Selain itu, Program SKALA juga mendukung strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk memperkuat mobilisasi pendapatan lokal, dengan tetap menjaga keseimbangan antara insentif investasi dan kebijakan perpajakan yang adil. Program SKALA juga mengeksplorasi peluang kemitraan pemerintah dengan badan usaha (KPBUs) serta model pembiayaan inovatif guna mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan mendorong diversifikasi ekonomi. Semua upaya ini bertujuan untuk memperkuat keberlanjutan fiskal di tingkat daerah sekaligus memastikan kebijakan fiskal tetap responsif terhadap kebutuhan pembangunan lokal.

Memastikan penentuan prioritas strategis, efektivitas, dan efisiensi anggaran program.

Ke depannya, Program SKALA akan terus memantau tren pembiayaan bersama (*co-financing*) oleh Pemerintah Indonesia untuk mengevaluasi dampak pemotongan anggaran secara menyeluruh dan memastikan keseimbangan antara biaya program dan operasional. Program SKALA juga menyempurnakan pendekatan keterlibatannya dengan mengutamakan kegiatan yang memiliki dampak kebijakan tinggi tetapi biayanya tetap efisien dibandingkan acara besar yang berbiaya tinggi. Selain itu, Program SKALA terus mengevaluasi apakah investasinya dalam Pemantauan, Evaluasi, Riset, dan Pembelajaran (MERL) sudah cukup untuk menghasilkan bukti yang diperlukan sebelum akhir tahap 1. Jika diperlukan, sumber daya akan disesuaikan guna memperkuat pengambilan keputusan berbasis bukti dan mendukung pendekatan program yang lebih adaptif.